

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
TAHUN 2015-2034**



**POLITENIK NEGERI BANDUNG
2015**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Rencana Induk Pengembangan (Renip) Politeknik Negeri Bandung periode 2015-2034 ini dapat diselesaikan.

Renip ini disusun berdasarkan Statuta Politeknik Negeri Bandung tahun 2006, isu-isu strategis tentang pendidikan tinggi baik internal maupun eksternal dan pandangan-pandangan sivitas akademika Politeknik Negeri Bandung serta memperhatikan rencana strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, Renip ini, yang disusun untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, dapat dijadikan sebagai dasar pijakan pengembangan perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Bandung baik untuk fungsi pengelolaan, kebijakan, pengawasan dan pertimbangan yang akan dilakukan oleh para pimpinan Politeknik Negeri Bandung.

Renip ini dapat selesai atas kerja keras tim Renip Politeknik Negeri Bandung dan andil berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah bekerja dalam menyelesaikan Renip ini.

Bandung, Mei 2015

Direktur,



Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T. .
NIP 196003161987191001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
I.1 Program dan Kegiatan Dalam Lima Tahun Terakhir.....	5
I.2 Tantangan Pengembangan.....	7
I.3 Dasar Hukum.....	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	12
II.1 Visi Polban.....	12
II.2 Misi Polban.....	12
II.3 Asas, Nilai dan Kebijakan Dasar.....	12
II.3.1 Asas.....	12
II.3.2 Nilai.....	13
II.3.3 Kebijakan Dasar.....	13
BAB III KEBIJAKAN PENGEMBANGAN	14
III.1 Kebijakan Pengembangan Bidang Pendidikan.....	14
III.1.1 Kebijakan Unggulan Pendidikan.....	14
III.1.2 Kebijakan Kualitas Pendidikan.....	14
III.1.3 Kebijakan Akses Pendidikan.....	14
III.1.4 Kebijakan Daya Saing Pendidikan.....	15
III.2 Kebijakan Pengembangan Bidang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	15
III.2.1 Kebijakan Arah Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	15
III.2.2 Kebijakan Penelitian.....	15
III.2.3 Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	16
III.3 Kebijakan Pengembangan Bidang Sumber Daya Manusia.....	16
III.3.1 Kebijakan Arah Sumber Daya Manusia.....	16
III.3.2 Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia.....	16
III.4 Kebijakan Pengembangan Bidang Tata Kelola.....	18
III.4.1 Kebijakan Tata Kelola Yang Bersih Dan Transparan.....	18
III.4.2 Kebijakan Tata Kelola Yang Tanggap Terhadap Perubahan.....	19
III.4.3 Kebijakan Tata Kelola yang Otonom.....	19
III.4.4 Kebijakan Tata Kelola yang Efektif dan Efisien.....	19
III.5 Kebijakan Pengembangan Bidang Sarana dan Prasarana.....	19
III.6 Kebijakan Pengembangan Bidang Keuangan.....	20

BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG TAHUN 2015-2034	22
IV.1 Arah dan Prioritas Pengembangan Polban	22
IV.2 Tahapan pencapaian.....	25
BAB V PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

Politeknik Negeri Bandung merupakan perguruan tinggi yang secara historis awalnya berada di bawah naungan Institut Teknologi Bandung dengan nama Politeknik Institut Teknologi Bandung didirikan pada tahun 1982, yang kemudian pada tahun 1997 dimandirikan dan diubah namanya menjadi Politeknik Negeri Bandung atau Polban, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat. Dalam fungsinya sebagai perguruan tinggi vokasi, Polban mengemban tanggungjawab moral untuk membangun peradaban sumberdaya manusia, serta secara khusus memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan daerah, nasional dan global, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (Renip) Politeknik Negeri Bandung (Polban) periode tahun 2015-2034 berlandaskan pada mandat yang telah diberikan kepada Polban sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi serta untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan demikian, arah pengembangan Renip Polban disusun sejalan dengan isi Statuta Polban, yang di dalamnya terkandung visi, misi, arah, sasaran, tugas dan kewajiban Polban dalam menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi serta memperhatikan perkembangan paradigma pendidikan tinggi saat ini.

Sebagai institusi perguruan tinggi, Polban mengemban misi mencerdaskan bangsa dan mengembangkan kehidupan bangsa. Polban juga bercita-cita menjadi pusat pengembangan sains terapan diberbagai disiplin ilmu baik rekayasa maupun nonrekayasa yang unggul dan terdepan dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang bermutu tinggi, melakukan penelitian terapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang terapan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia dan kemaslahatan umat manusia.

Polban sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi, berkewajiban menghasilkan sumber daya manusia yang berbudaya terapan, yang merupakan ujung tombak industri nasional. Polban yang memfokuskan kegiatannya pada ilmu-ilmu terapan, berkewajiban mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara nyata berdampak positif pada kepentingan inovasi nasional serta mampu menciptakan nilai tambah maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

I.1 Program dan Kegiatan Dalam Lima Tahun Terakhir

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan POLBAN dalam lima tahun terakhir telah menghasilkan capaian-capaian yang membentuk kondisi umum pendidikan di POLBAN pada akhir tahun 2014 sebagaimana disampaikan di bawah.

Dalam kurun waktu tersebut telah dilakukan berbagai program dan kegiatan terkait pengembangan bidang yang meliputi bidang pendidikan, bidang penelitian dan pengabdian

Tabel 1. Hubungan Antara Program Prioritas dan Bidang Pengembangan

No	Bidang Pengembangan POLBAN	Program dan Kegiatan prioritas dalam lima tahun terakhir
1.	Bidang Pendidikan	Pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru secara online
2.	Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Perluasan Kesempatan Penelitian
3.	Bidang Sumber Daya Manusia	Pengembangan sistem pengembangan dan remunerasi tenaga kependidikan
4.	Bidang Tata Kelola	Pendirian Prodi Magister Sains Terapan
5.	Bidang Sarana dan Prasarana	Pengembangan Sarana Kampus
6.	Bidang Keuangan	Pengembangan Sistem Informasi keuangan



Catatan: LRAISE: Leadership, Relevance, Academic Atmosphere, Internal Management, Sustainability, Efficiency & Productivity

Gambar 1. Tahapan Capaian Jangka Panjang POLBAN

I.2 Tantangan Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis kondisi POLBAN saat ini, diperoleh potensi masalah sebagai berikut:

Rencana Induk Pengembangan Polban 2015 - 2024

Potensi masalah pada elemen lulusan yang berkualitas antara lain:

- a. Keketatan persaingan masuk Polban untuk setiap program studi perlu ditingkatkan;
- b. Jumlah mahasiswa program pasca sarjana perlu ditingkatkan;
- c. Jumlah mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu untuk setiap jenjang pendidikan perlu ditingkatkan;
- d. Kemampuan bahasa Inggris mahasiswa perlu ditingkatkan;
- e. Jumlah sertifikat kompetensi per mahasiswa perlu ditingkatkan;
- f. Waktu tunggu kerja lulusan perlu dipersingkat;
- g. Jumlah prestasi non-akademik per tahun perlu ditingkatkan;
- h. Jumlah keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi nasional/internasional perlu ditingkatkan;
- i. Jumlah keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan masyarakat perlu ditingkatkan;
- j. Dosen pendamping yang komitmen tinggi dan visioner minimal di tingkat nasional dalam setiap kegiatan;
- k. Paradigma lama dalam kegiatan mahasiswa, kegiatan mengarah ke perploncoan, arogansi kelompok, tanpa orientasi tantangan ke depan.

Sedangkan potensi masalah pada elemen inovasi meliputi:

- a. Jumlah hilirisasi produk perlu ditingkatkan;
- b. Jumlah layanan jasa penyelesaian masalah industri perlu ditingkatkan;
- c. Jumlah layanan bersifat training kepada industri perlu ditingkatkan;
- d. Jumlah produk yang dihasilkan dari penelitian terapan perlu ditingkatkan;
- e. Jumlah jasa maupun produk yang digunakan masyarakat perlu ditingkatkan;
- f. Belum terbangunnya unit/bagian yang dapat mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan di masyarakat, baik masyarakat industri maupun umum;
- g. Belum terbangunnya unit/bagian yang dapat mensosialisasikan dan menghubungkan hasil penelitian, terutama hasil penelitian terapan, dengan masyarakat yang memerlukan.

Potensi masalah pada elemen penelitian dan pengembangan adalah:

- a. Jumlah dan kualitas penelitian perlu ditingkatkan;
- b. Keterlibatan dosen dan tenaga kependidikan dalam kegiatan penelitian perlu ditingkatkan;
- c. Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat masih kurang;
- d. Jumlah publikasi jurnal nasional terakreditasi dan internasional kurang;
- e. Integrasi penelitian ke pengajaran perlu ditingkatkan;
- f. Beban dosen mengajar lebih dominan sehingga belum semua dosen Polban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara teratur (setiap tahun);
- g. Untuk kegiatan PkM, jumlah anggaran yang masih relatif kecil dibandingkan dengan anggaran penelitian;
- h. Keterbatasan informasi untuk mengakses berbagai sumber dana PM;
- i. Keterbatasan laboratorium dan fasilitas secara kualitas dan kuantitas yang didedikasikan untuk kegiatan PPM.

Potensi masalah terkait dengan elemen kelembagaan berkualitas adalah:

- a. Akreditasi prodi belum semua A;
- b. Jumlah Prodi magister/pasca sarjana masih perlu ditingkatkan;
- c. Akreditasi institusi masih berperingkat B;
- d. SOTK dan Statuta perlu diperbaharui;
- e. Jumlah dan kualitas kerjasama Industri perlu ditingkatkan;
- f. Jumlah dan kualitas kerjasama regional dan internasional perlu ditingkatkan;
- g. Jumlah tempat uji kompetensi perlu ditingkatkan.

Potensi masalah pada elemen sumber daya berkualitas adalah sebagai berikut:

- a. Mayoritas dosen berusia di atas 50 tahun;
- b. Jumlah dosen baru perlu ditingkatkan;
- c. Kualifikasi Pendidikan dosen perlu ditingkatkan;
- d. Kepangkatan dosen secara umum perlu ditingkatkan;
- e. Kepangkatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) ditingkatkan;
- f. Jumlah dosen bersertifikasi kompetensi masih kurang;
- g. Jumlah PLP bersertifikasi kompetensi masih kurang;
- h. Peralatan laboratorium perlu direvitalisasi;
- i. Sarana laboratorium untuk penelitian masih kurang;
- j. Jumlah dan kualitas ruang kelas perlu ditingkatkan;
- k. Sarana belajar selain ruang kelas perlu direvitalisasi;
- l. Kurangnya fasilitas umum: kantin, layanan kesehatan, sarana olah raga;
- m. Kapasitas teknologi informasi belum memadai;
- n. Kapasitas dan kualitas layanan asrama masih kurang;
- o. Belum tumbuhnya kesadaran untuk dapat memelihara dan merawat sarana dan prasarana yang ada dengan baik;
- p. Belum dapat mengoptimalkan hasil kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan sarana dan prasarana;
- q. Proporsi dana dari mahasiswa masih cukup besar dan proporsi dana hibah jauh masih kecil;
- r. Proporsi dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk belanja pegawai perlu dievaluasi;
- s. Sistem pengelolaan keuangan belum memanfaatkan sistem akuntansi informasi;

Belum ada sistem yang menjembatani antara pengelola keuangan berbasis program di unit/jurusan dengan pengelolaan keuangan berbasis Mata Anggaran Kegiatan (MAK) di pusat

I.3 Dasar Hukum

1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No.4. Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Statuta Politeknik Negeri Bandung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan kecenderungan perubahan lingkungan eksternal dan internal serta memperhatikan peraturan pemerintah yang berlaku, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis POLBAN ditetapkan. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis ini tercantum dalam Statuta Politeknik Negeri Bandung yang ditetapkan melalui Permendiknas No. 3 Tahun 2006.

II.1 Visi Polban

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung, maka visi Polban adalah:

Menjadi institusi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Polban mengemban misi mencerdaskan bangsa dan mengembangkan kehidupan bangsa. Polban juga bercita-cita menjadi pusat pengembangan sains terapan diberbagai disiplin ilmu baik rekayasa maupun nonrekayasa yang unggul dan terdepan dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang bermutu tinggi, melakukan penelitian terapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang terapan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia dan kemaslahatan umat manusia.

Polban sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi, berkewajiban menghasilkan sumber daya manusia yang berbudaya terapan, yang merupakan ujung tombak industri nasional. Polban yang memfokuskan kegiatannya pada ilmu-ilmu terapan, berkewajiban mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara nyata berdampak positif pada kepentingan inovasi nasional serta mampu menciptakan nilai tambah maksimal untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat dan bangsa Indonesia.

II.2 Misi Polban

Perwujudan visi Polban tersebut ditempuh melalui penyelenggaraan tiga misi Polban yaitu:

- a. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki semangat terus berkembang, bermoral, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan;
- b. Melaksanakan penelitian terapan dan menyebarkan hasil-hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan.

II.3 Asas, Nilai dan Kebijakan Dasar

II.3.1 Asas

Kebijakan dasar pendidikan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Kebenaran dan keluhuran budi pekerti;

- b. Kebhinekaan, keadilan dan kesejajaran;
- c. Kebersamaan dan kesejahteraan;
- d. Kepatuhan terhadap peraturan dan beretika, serta
- e. Keterbukaan dan kemandirian.

II.3.2 Nilai

Nilai yang dianut oleh Polban adalah:

- a. Moral/Agama dan Ilmu;
- b. Kemanusiaan;
- c. Manfaat;
- d. UUD, undang-undang, peraturan dan peradaban bangsa Indonesia;
- e. Organisasi bersih, efektif, efisien dan semangat mutu serta wirausaha.
- f. Responsif terhadap perubahan yang terjadi
- g. Adaptif terhadap *stakeholders*
- h. Menjunjung tinggi produktivitas
- i. Kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur kerja
- j. Kedisiplinan dan berdikasi

II.3.3 Kebijakan Dasar

Polban akan selalu mengacu pada kondisi-kondisi berikut ini.

- a. Membangun sinergi internal melalui pemberdayaan sumber daya manusia, disiplin ilmu, dan secara eksternal melalui kerja sama Polban dengan industri/masyarakat;
- b. Menjaga akuntabilitas yang didasari prestasi dan transparansi;
- c. Memegang komitmen pada efektifitas kerja, mutu dan efisiensi;
- d. Mengembangkan keunggulan melalui kreativitas, inovasi, dan adaptasi berkelanjutan;
- e. Mengembangkan keterlibatan, kepedulian, kedisiplinan dan partisipasi terhadap kebutuhan lingkungan;
- f. Membangun integritas dalam bentuk konsistensi antara perkataan dan perbuatan, perilaku etis, dan berbudaya;
- g. Menghormati hak individu, keahlian, tugas, dan kebutuhan semua pemangku kepentingan;
- h. Menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi kelimuan seperti yang dituangkan dalam BAB VIII pasal 23-25 Statuta Politeknik Negeri Bandung, yang dilaksanakan secara konsisten melalui perencanaan pengembangan dan diimplementasikan dalam penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan mengacu ke UU Nomor 12 tahun 2012.

BAB III

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

III.1 Kebijakan Pengembangan Bidang Pendidikan

III.1.1 Kebijakan Unggulan Pendidikan

Pendidikan di Polban diarahkan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang siap digunakan di industri maupun untuk berwirausaha. Pendidikan yang dilaksanakan adalah pendidikan tinggi vokasi, mulai jenjang diploma hingga program pasca sarjana. Keterpaduan kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk pada industri/dunia kerja dan pengembangan kewirausahaan pada setiap program studi merupakan ciri khas yang selalu dikembangkan oleh Polban.

Untuk mencapai keunggulan pendidikan di tingkat nasional dan internasional, program studi perlu diberdayakan baik melalui pengembangan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan maupun kerja sama dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah baik dalam maupun luar negeri. Pencapaian keunggulan pendidikan ini tetap menjadi landasan utama dalam melakukan kerja sama program studi atau pelatihan dengan pihak-pihak eksternal Polban.

Peningkatan proses pembelajaran yang bersifat *softskill* akan mendapat perhatian utama sehingga menghasilkan lulusan yang berkemampuan intelektual dan *softskill* yang dapat beradaptasi dengan dunia industri dan sosial kemasyarakatan. Proses pembelajaran yang bersifat pendidikan moral, etika dan kemampuan berorganisasi, komunikasi dan kewirausahaan dikembangkan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler kemahasiswaan, yang didukung dengan atmosfer jiwa kompetitif, kejujuran, anti korupsi dan kerja keras. Jejaring kegiatan dengan industri, organisasi profesi digalakkan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses pembelajaran.

III.1.2 Kebijakan Kualitas Pendidikan

Proses pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan selalu menerapkan sistem penjaminan mutu, untuk menjamin agar lulusannya sesuai dengan persyaratan atau standar pemangku kepentingan. Kebijakan kualitas pendidikan, Polban menetapkan sasaran mutu setiap program studi yang sudah mapan mencapai akreditasi BAN-PT bernilai A, sedangkan untuk program studi baru harus terakreditasi dengan sasaran mutu akreditasi B. Di samping itu, proses pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menggunakan standar kualitas internasional. Agar Polban dapat melaksanakan pendidikan berkualitas, perlu dilakukan revitalisasi dan optimalisasi penggunaan peralatan laboratorium. Selain itu juga perlu melengkapi peralatan tersebut sesuai dengan laju pertumbuhan program studi baru serta penambahan jumlah mahasiswa.

III.1.3 Kebijakan Akses Pendidikan

Untuk mencapai perluasan akses pendidikan tinggi dan pelatihan, Polban membuka akses untuk masyarakat luas dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Polban berusaha untuk menjadikan program pendidikannya menjadi pilihan utama bagi lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berkualitas. Selain itu, Polban juga memperluas kesempatan penerimaan kepada calon mahasiswa yang berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah.

III.1.4 Kebijakan Daya Saing Pendidikan

Dalam merumuskan kebijakan daya saing pendidikan, pengembangan pendidikan tinggi yang bersifat vokasi tetap menjadi *core bisnis* yang diselenggarakan oleh Polban. Pengembangan untuk peningkatan daya saing baik nasional maupun internasional dilakukan melalui:

- a. Peningkatan jenjang pendidikan tenaga pendidik hingga mencapai strata 3;
- b. Peningkatan kerja sama dengan institusi pendidikan/pelatihan lain baik dalam maupun luar negeri;
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas program studi D-III dan D-IV (Sarjana
- d. Sains Terapan / SST);
- e. Pengembangan program studi unggulan D-III dan D-IV;
- f. Perintisan terselenggaranya program pasca sarjana terapan melalui kerja sama lembaga dengan perguruan tinggi lain dan mempersiapkan sumber daya untuk program terkait; dan

III.2 Kebijakan Pengembangan Bidang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kebijakan pengembangan bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) dilaksanakan secara terstruktur di bawah koordinasi organ P2M melalui mekanisme yang terbuka, akuntabel, berkelanjutan, konsisten, dan mengacu kepada peningkatan kualitas serta kuantitas. Tiga pilar kegiatan organ P2M yang dilakukan adalah penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama Lembaga.

III.2.1 Kebijakan Arah Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Program P2M dilakukan pada bidang-bidang dan/atau sub-subbidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang ditentukan dengan mempertimbangkan arahan/kebijakan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan riset dan/atau iptek, serta arah kebutuhan masyarakat baik pada tingkat lokal, nasional, maupun regional Asia dan masyarakat internasional lainnya berdasarkan dukungan sumber daya yang memadai. Pemilihan subbidang dan tingkat kedalaman kajian/penerapan iptek dari kegiatan P2M dilakukan dengan mempertimbangkan juga peran lembaga sejenis yang lain yang membuka peluang bagi terbentuknya sinergi/kemitraan.

Pelaksana P2M utamanya adalah tenaga pendidik dan mahasiswa yang mempunyai kompetensi pada bidangnya. Dalam hal ini, diperlukan suatu konsistensi kegiatan pada setiap bidang/subbidang penelitian di tingkat individu, kelompok bidang keahlian, jurusan agar dapat dicapai kontribusi yang optimal dalam pengembangan iptek, mengacu kepada *roadmap* penelitian terapan.

III.2.2 Kebijakan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan mahasiswa Polban diprioritaskan sebagai penelitian terapan, yang diarahkan untuk:

- a. Memenuhi dan pengembangan *Roadmap* penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat Polban yang dapat dijadikan sebagai acuan arah penelitian terapan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian terapan;
- c. Membangun budaya penelitian terapan yang diarahkan untuk dapat menghasilkan karya inovatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat;

- d. Menghasilkan produk penelitian pengembangan iptek yang bisa diterapkan oleh industri dan masyarakat sehingga mempunyai kontribusi langsung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat lokal, nasional dan dalam jangka panjang bisa mencapai lingkup regional/internasional;
- e. Meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam penguasaan dan pengembangan suatu bidang/subbidang iptek;
- f. Meningkatkan kualitas institusi Polban dengan mengusahakan terbitnya karya- karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional serta HaKI.

III.2.3 Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Polban diarahkan pada upaya implementasi dan/atau diseminasi iptek dan/atau hasil penelitian dengan tujuan untuk: Mengaplikasikan iptek yang dimiliki oleh seluruh tenaga pendidik dan mahasiswa sehingga mempunyai kontribusi langsung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat lokal dan nasional;

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal iptek dan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan kepekaan dan kompetensi tenaga pendidik dan mahasiswa dalam menangani persoalan dalam kehidupan masyarakat; dan
- c. Menyelenggarakan berbagai pelatihan yang diperuntukan bagi tenaga kerja atau lulusan SMA dan SMK yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

III.3 Kebijakan Pengembangan Bidang Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Polban akan meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini bertujuan agar SDM Polban mempunyai kompetensi dalam menjalankan visi-misi Polban untuk mendukung tridharma perguruan tinggi. Dalam pengembangan SDM, Polban akan memperhatikan jalur pendidikan yang linier untuk tenaga pendidik sesuai dengan Kelompok Keahlian (KK).

III.3.1 Kebijakan Arah Sumber Daya Manusia

Kebijakan arah pengembangan SDM adalah untuk:

- a. Membangun pribadi yang luhur melalui program *character building*;
- b. Merencanakan dan mewujudkan SDM yang mempunyai kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi melalui penguatan fungsi dan peranan KK;
- c. Mengembangkan kompetensi dan kemampuan intelektual SDM serta mempunyai komitmen mutu dan efisiensi dalam pelaksanaannya;
- d. Membangun semangat kemandirian melalui kegiatan yang mendorong terbentuknya otonomi sumber daya manusia dan kewirausahaan.

III.3.2 Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Kebijakan peningkatan SDM akan diberlakukan untuk seluruh kegiatan secara proporsional sesuai kebutuhan. Keselarasan proporsi kemampuan SDM dimaksudkan untuk mewujudkan iklim kerja yang kondusif di semua organ pengelola dan lapisan SDM. Untuk itu diperlukan program:

- a. Penerimaan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengisi kekurangan kapasitas secara bertahap, mengantisipasi terjadinya masa purnabakti

- yang cukup besar pada periode 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun mendatang;
- b. Peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik yang sudah ada dengan dukungan kuat dari Polban untuk peningkatan pendidikan jalur formal dan informal, keikutsertaan dalam seminar-seminar nasional dan internasional, peluang untuk melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta terimplementasinya sistem otonomi Polban;
 - c. Peningkatan kemampuan bagi tenaga kependidikan;
 - d. Pembinaan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang baru melalui program yang terencana;
 - e. Penerapan sistem otonomi manajemen SDM yang mengarah pada kemandirian institusi.

III.3.2.1 Program Character Building

Program *character building* bertujuan membentuk kejujuran, keteladanan, kebersamaan, kepedulian terhadap lingkungan, kebersihan dan ketertiban penyelenggaraan pendidikan serta profesionalisme dalam bekerja.

Program ini bertujuan untuk:

- a. Membangun kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, dan kreativitas untuk pembaharuan melalui pelatihan internal dan eksternal;
- b. Mempersiapkan dan mengimplementasikan sistem *reward* dan *punishment* berdasarkan hasil kerja, capaian kinerja, keunggulan kompetensi dan keahlian;
- c. Merencanakan pengembangan karier yang jelas.

III.3.2.2 Program Pemenuhan Kapasitas

Program pemenuhan kapasitas ini bertujuan agar Polban memiliki kapasitas SDM yang memadai untuk menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pemenuhan kualitas SDM maupun peningkatan SDM secara kualitatif.

Pemenuhan kuantitas SDM dilakukan melalui:

- a. Penerimaan pegawai baru yang memenuhi persyaratan baik untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. Pengisian kekosongan tenaga pendidik tetap dilakukan dengan mengadakan tenaga pendidik tidak tetap dari perguruan tinggi lain dan pekerja kontrak untuk tenaga kependidikan serta *outsourcing* untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Peningkatan SDM secara kualitatif melalui:

- a. Pendidikan formal di dalam dan luar negeri
- b. Kerja sama penelitian dengan lembaga di dalam dan luar negeri;
- c. Sertifikasi profesional;
- d. Kerja sama industri dan instansi terkait dalam bentuk magang dan pelatihan;
- e. Melalui pelatihan internal dan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

III.3.2.3 Program Pengembangan Kompetensi

Program pengembangan SDM Polban yang mempunyai komitmen mutu ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan intelektual SDM yang memiliki komitmen mutu sesuai dengan visi, misi dan tata nilai di lingkungan Polban.

Program pembangunan kompetensi dapat dilakukan melalui:

- a. Pendidikan formal;
- b. Pelatihan dan upaya untuk memperoleh sertifikasi profesional dan kompetensi pendukung lainnya;
- c. Penerapan hasil *Benchmarking* sistem manajemen mutu untuk institusi pendidikan sejenis sehingga membangkitkan inovasi dan kreativitas tenaga terkait dengan komitmen mutu yang telah dicanangkan.

III.3.2.4 Program Pembentukan Kemandirian

Program pembentukan kemandirian ini dilakukan untuk mendorong terbentuknya otonomi dari setiap organ pengelola di lingkungan Polban.

Program ini dapat dilakukan melalui:

- a. Implementasi otonomi manajemen organisasi sehingga dapat merealisasikan struktur organisasi dan tata kerja, sistem pengendalian dan pengawasan internal, serta sistem penjaminan mutu internal;
- b. Implementasi otonomi manajemen akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana sehingga implementasi tridharma pendidikan tinggi dapat dilakukan lebih efektif dan efisien;
- c. Implementasi Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
- d. Implementasi kerja sama dengan mitra Polban untuk peningkatan ketrampilan *softskill* dan *technopreneurship*;
- e. Implementasi program dan kegiatan untuk penguasaan *soft-skill* dan *technopreneur* yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki maupun kerja sama dengan mitra Polban.

III.4 Kebijakan Pengembangan Bidang Tata Kelola

Tata kelola yang dikembangkan Polban akan mengarah pada tata kelola yang bersih dan transparan, tata kelola yang tanggap terhadap perubahan, tata kelola yang otonomi dan tata kelola yang efektif dan efisien. Tata nilai yang akan diterapkan adalah mengacu pada prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi dan akses berkeadilan. Organ-organ pengelola diberi kewenangan secara proporsional dalam penyelenggaraan kegiatan dan mempunyai komitmen mutu.

III.4.1 Kebijakan Tata Kelola Yang Bersih Dan Transparan

Tata kelola yang bersih dan transparan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif. Akuntabilitas publik kepada semua pemangku kepentingan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pengaktifan satuan pengawas internal (SPI) yang mempunyai fungsi pengawasan nonakademik, dan partisipasi eksternal (pemangku kepentingan) yang kondusif sangat diperlukan untuk meminimumkan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku danantisipasi terhadap penyimpangan lebih cepat terdeteksi.

III.4.2 Kebijakan Tata Kelola Yang Tanggap Terhadap Perubahan

Polban disiapkan sebagai organisasi yang tanggap terhadap perubahan-perubahan. Menanggapi perubahan kebijakan pemerintah sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Polban harus mengembangkan struktur organisasinya untuk dapat menjalankan minimal 4 (empat) fungsi utama, yaitu: 1) fungsi pengelolaan, 2) fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik, 3) fungsi pengawasan bidang non-akademik dan 4) fungsi pertimbangan bidang non-akademik dan pertimbangan lain.

Dalam menanggapi perkembangan industri, perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, dan globalisasi, Polban perlu menyiapkan organisasinya yang mampu untuk beradaptasi dalam melakukan kerja sama dan menerapkan standar kerja serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang telah menjadi tuntutan global.

III.4.3 Kebijakan Tata Kelola yang Otonom

Tata kelola Polban menyiapkan proses transformasi menuju budaya mandiri sebagai pengganti dari budaya menunggu instruksi dari pemerintah sehingga mendorong kemajuan prestasi. Paradigma budaya baru ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan semangat baru masyarakat Polban untuk dapat lebih banyak terlibat aktif dalam proses pembaharuan dan pengembangan diri sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan profesionalisme diri sebagai pribadi maupun kemajuan Polban sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi.

Kemandirian perlu dibangun melalui pemberian otonomi pada tingkat institusi hingga organ-organ pengelola di bawahnya, seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, baik dari segi akademik dan non-akademik.

Sikap mental Polban yang proaktif perlu dipersiapkan untuk menciptakan peluang-peluang maju. Polban perlu menjalin komunikasi aktif dengan lembaga pemerintah dan industri baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kecenderungan globalisasi memberikan peluang keterbukaan komunikasi dengan dunia luar yang lebih mudah. Sikap proaktif juga perlu dibangun dalam berkontribusi kepada masyarakat dalam hal pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan.

III.4.4 Kebijakan Tata Kelola yang Efektif dan Efisien

Pengelolaan kegiatan akademik merupakan birokrasi desentralistik di mana Jurusan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu program tridharma pendidikan tinggi. Dalam pengelolaan nonakademik, Polban menerapkan pola birokrasi yang bersifat sentralistik, sehingga penggunaan dan pemanfaatan sumber daya menjadi lebih efisien.

Pola perencanaan yang terintegrasi diharapkan bisa menghasilkan suatu kerja sama antar disiplin yang masing-masing bisa bekerja sesuai bidang ilmunya sehingga mencapai sinergi. Kesiapan mental kerja yang *profesional* dari setiap unit senantiasa dibangun agar supaya sistem kerja sama akan berjalan efektif dan efisien. Kegiatan yang terintegrasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk itu, Polban perlu struktur atau hierarki organisasi yang efisien, efektif dan inovatif. Di samping itu, dibutuhkan *teamwork/taskforce* (baik lintas jurusan maupun multi disiplin) dalam menangani suatu kegiatan sehingga dapat menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi.

III.5 Kebijakan Pengembangan Bidang Sarana dan Prasarana

Pengembangan sarana dan prasarana bertujuan untuk mendukung/memfasilitasi kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan kemahasiswaan. Pengembangan tersebut

akan mengacu pada peraturan/standar yang berlaku baik lokal, nasional maupun global, serta memperhatikan aspek efisiensi dan ramah lingkungan. Pengembangan kampus Polban akan memperhatikan aspek keamanan dan ketenangan sivitas akademik dalam proses pembelajaran. Adapun pengembangan sarana dan prasarana Polban meliputi pembangunan, pengadaan dan perawatan:

- a. Gedung/bangunan utama dan pendukung.
- b. Laboratorium, studio, perpustakaan, dan perkantoran.
- c. Furnitur.Sarana dan prasarana olah raga, kesenian, dan rekreasi.
- d. Utilitas (parkir, jalan, air bersih, drainase, resapan air, engelolaan limbah, listrik, sarana komunikasi)
- e. Sistem informasi, teknologi informasi, dan komunikasi.
- f. Tempat uji kompetensi.

Pengembangan sarana dan prasarana Polban bertujuan untuk menciptakan kondisi kampus Polban sebagai berikut:

- a. Kampus nyaman
 - a.1. Memiliki ruang dan fasilitas yang memadai untuk semua aktivitas;
 - a.2. Memiliki lingkungan yang hijau, bersih, tertib, tenang;
 - a.3. Memiliki estetika bangunan;
 - a.4. Memiliki utilitas air bersih yang madai.
- b. Kampus aman:
 - b.1. Memiliki keamanan dari tindak kriminal;
 - b.2. Memiliki fasilitas pemadam kebakaran;
 - b.3. Memilikiantisipasi terhadap bencana alam;
 - b.4. Memiliki pencegahan kecelakaan.
- c. Kampus efektif dan efisien:
 - c.1. Memiliki zona kegiatan dengan kelompok fungsi yang teratur;
 - c.2. Memiliki fasilitas berkualitas baik;
 - c.3. Memiliki operasional yang mudah dan murah;
 - c.4. Memiliki sifat yang hemat energi.
- d. Fasilitas kampus berwawasan global:
 - d.1. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar internasional;
 - d.2. Memilikin fasilitas informasi dan komunikasi yang memadai;
 - d.3. Memiliki fasilitas kampus yang nyaman buat seluruh seluruh masyarakat Polban.
- e. Kampus yang ramah terhadap lingkungan:
 - e.1. Memiliki sistem dan fasilitas pengelolaan limbah yang memadai;
 - e.2. Memiliki kampus hijau dengan serapan air yang baik;
 - e.3. Memiliki kontribusi terhadap masyarakat sekitarnya.

III.6 Kebijakan Pengembangan Bidang Keuangan

Terdapat dua sumber dana utama yaitu dana yang berasal dari pemerintah dan dana yang berasal dari masyarakat yaitu berasal dari mahasiswa, masyarakat, kerja sama industri dan dari sumber lain. Sumber dana atas usaha mandiri diusahakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada yang terdiri dari modal intelektual, modal sarana

dan prasarana. Kebijakan pengembangan keuangan yang dilakukan Polban didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 menuju otonomi perguruan tinggi yang meliputi:

- a. Norma dan kebijakan pengelolaan bidang keuangan;
- b. Perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang;
- c. Tarif setiap jenis layanan pendidikan;
- d. Penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang;
- e. Melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang;
- f. Melakukan pengikatan dalam tri dharma perguruan dengan pihak ketiga;
- g. Memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan
- h. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.

BAB IV

ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG TAHUN 2015-2034

IV.1 Arah dan Prioritas Pengembangan Polban

Dalam menyelenggarakan Misi Polban ditetapkan 5 tujuan jangka panjang Polban sebagai berikut:

- a. menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang berstandar nasional dan/atau internasional.
- b. membangun jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika yang dapat menumbuhkembangkan sektor industri.
- c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.
- d. memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat Indonesia berazaskan pemerataan dan keadilan.
- e. mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan industri, masyarakat dan pemerintah.

Sebagai ukuran tercapainya tujuan Polban dalam 20 tahun mendatang diarahkan pencapaian sebagai berikut:

- A. Terwujudnya lulusan dengan kompetensi yang berstandar nasional dan/atau internasional melalui:**
1. Tercapainya proses pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang menerapkan sistem penjaminan mutu, untuk menjamin agar lulusannya sesuai dengan persyaratan atau standar pemangku kepentingan.
 2. Tercapainya standar kualitas pendidikan Polban yang menetapkan sasaran mutu setiap program studi yang sudah mapan mencapai akreditasi BAN-PT bernilai A, sedangkan untuk program studi baru harus terakreditasi dengan sasaran mutu akreditasi B dengan proses pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menggunakan standar kualitas internasional.
 3. Terlaksananya revitalisasi dan optimalisasi penggunaan peralatan laboratorium serta tersedianya peralatan yang lengkap sesuai dengan laju pertumbuhan program studi baru serta penambahan jumlah mahasiswa.
 4. Terlaksananya pengembangan pendidikan tinggi yang bersifat vokasi yang menjadi *core business* penyelenggaraan pendidikan di Polban.
 5. Terlaksananya pengembangan untuk peningkatan daya saing baik nasional maupun internasional.
 6. Terpenuhinya SDM Polban yang kompeten dan memiliki komitmen mutu sesuai dengan visi, misi dan tata nilai di lingkungan Polban.
 7. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung/memfasilitasi kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan kemahasiswaan yang mengacu pada peraturan/standar yang berlaku baik lokal, nasional maupun global, serta memperhatikan aspek efisiensi dan ramah lingkungan serta aspek keamanan dan ketenangan sivitas akademik dalam proses pembelajaran.

B. Terwujudnya civitas academica yang berjiwa kewirausahaan sehingga dapat menumbuhkembangkan sektor industri melalui:

1. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan pada upaya implementasi dan/atau diseminasi iptek dan/atau hasil penelitian yang mengaplikasikan iptek yang dimiliki oleh seluruh tenaga pendidik dan mahasiswa sehingga mempunyai kontribusi langsung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat lokal dan nasional; meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal iptek dan kewirausahaan; dan meningkatkan kepekaan dan kompetensi tenaga pendidik dan mahasiswa dalam menangani persoalan dalam kehidupan Masyarakat.
2. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) Polban baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi untuk mendukung tridharma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya semangat kemandirian melalui kegiatan yang mendorong terbentuknya otonomi sumber daya manusia dan kewirausahaan.

C. Terwujudnya pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional melalui:

1. Terwujudnya Kebijakan pengembangan bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) secara terstruktur di bawah koordinasi organ P2M melalui mekanisme yang terbuka, akuntabel, berkelanjutan, konsisten, dan mengacu kepada peningkatan kualitas serta kuantitas.
2. Terlaksananya program P2M dilakukan pada bidang-bidang dan/atau sub-subbidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang ditentukan dengan mempertimbangkan arahan/kebijakan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan riset dan/atau iptek, serta arah kebutuhan masyarakat baik pada tingkat lokal, nasional, maupun regional Asia dan masyarakat internasional lainnya berdasarkan dukungan sumber daya yang memadai.
3. Terlaksananya pemilihan subbidang dan tingkat kedalaman kajian/penerapan iptek dari kegiatan P2M dilakukan dengan mempertimbangkan juga peran lembaga sejenis yang lain yang membuka peluang bagi terbentuknya sinergi/kemitraan.
4. Terpenuhinya pelaksana P2M yang terdiri dari tenaga pendidik dan mahasiswa yang mempunyai kompetensi pada bidangnya yang memiliki konsistensi kegiatan pada setiap bidang/subbidang penelitian di tingkat individu, kelompok bidang keahlian, jurusan untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam pengembangan iptek, mengacu kepada *roadmap* penelitian terapan.
5. Terlaksananya penelitian tenaga pendidik dan mahasiswa Polban yang diprioritaskan pada penelitian terapan.
6. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Polban diarahkan pada upaya implementasi dan/atau diseminasi iptek dan/atau hasil penelitian untuk memberikan kontribusi langsung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat lokal dan nasional; meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal iptek dan kewirausahaan; dan meningkatkan kepekaan dan kompetensi tenaga pendidik dan mahasiswa dalam menangani persoalan dalam kehidupan Masyarakat.
7. Terpenuhinya SDM yang memadai untuk menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi.

D. Terwujudnya kesempatan belajar bagi masyarakat Indonesia berazaskan pemerataan dan keadilan melalui:

1. Terwujudnya perluasan akses pendidikan tinggi dan pelatihan, Polban untuk masyarakat luas dari seluruh Indonesia dan luar negeri.
2. Terwujudnya sistem penerimaan mahasiswa baru yang bersifat transparan dan akuntabel.
3. Terwujudnya program pendidikan Polban sebagai pilihan utama bagi lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berkualitas.
4. Terwujudnya kesempatan penerimaan kepada calon mahasiswa yang berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah.
5. Terselenggaranya berbagai pelatihan yang diperuntukan bagi tenaga kerja atau lulusan SMA dan SMK yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

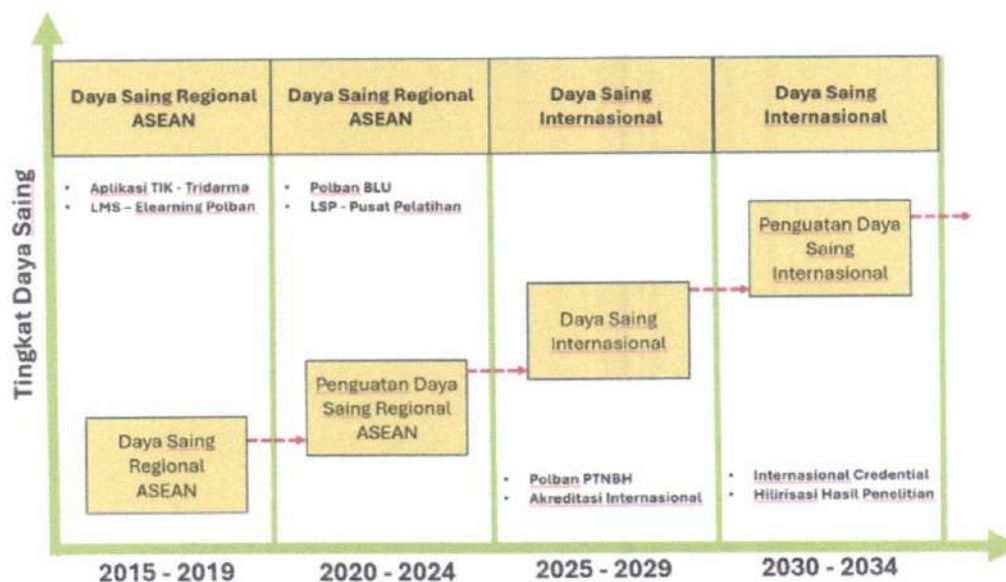
E. Terwujudnya keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan industri, masyarakat dan pemerintah melalui:

1. Terwujudnya iklim kerja yang kondusif di semua organ pengelola dan lapisan SDM.
2. Terpenuhinya kebutuhan SDM baik dari segi jumlah maupun kompetensi.
3. Terlaksananya penerapan sistem otonomi manajemen SDM yang mengarah pada kemandirian institusi.
4. Terwujudnya struktur organisasinya yang dapat menjalankan minimal 4 (empat) fungsi utama, yaitu: 1) fungsi pengelolaan, 2) fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik, 3) fungsi pengawasan bidang non-akademik dan 4) fungsi pertimbangan bidang non-akademik dan pertimbangan lain.
5. Terwujudnya organisasi yang mampu untuk beradaptasi dalam melakukan kerja sama dan menerapkan standar kerja serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang telah menjadi tuntutan global dalam menanggapi perkembangan industri, perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, dan globalisasi.
6. Terlaksananya proses transformasi menuju budaya mandiri sebagai pengganti dari budaya menunggu instruksi dari pemerintah sehingga mendorong kemajuan prestasi dengan aktif dalam proses pembaharuan dan pengembangan diri sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan profesionalisme diri sebagai pribadi maupun kemajuan Polban sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi.
7. Terwujudnya kemandirian melalui pemberian otonomi pada tingkat institusi hingga organ-organ pengelola di bawahnya, baik dari segi akademik dan non-akademik.
8. Terbentuknya sikap mental Polban yang proaktif untuk menciptakan peluang-peluang maju agar dapat menjalin komunikasi aktif dengan lembaga pemerintah dan industri baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk berkontribusi kepada masyarakat dalam hal pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan.
9. Terlaksananya pengelolaan kegiatan akademik yang menerapkan birokrasi desentralistik di mana Jurusan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu program tridharma pendidikan tinggi, sehingga penggunaan dan pemanfaatan sumber daya menjadi lebih efisien.

10. Terlaksananya pola perencanaan yang terintegrasi sehingga menghasilkan suatu kerja sama antar disiplin yang masing-masing bisa bekerja sesuai bidang ilmunya sehingga mencapai sinergi.
11. Terwujudnya struktur atau hierarki organisasi yang efisien, efektif dan inovatif dengan *teamwork/taskforce* (baik lintas jurusan maupun multi disiplin) dalam menangani suatu kegiatan sehingga dapat menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi.
12. Terwujudnya kampus yang mendukung aktifitas tridarma dan kerjasama yang memenuhi kriteria kampus nyaman, kampus aman, kampus efektif dan efisien, kampus yang ramah terhadap lingkungan, dengan fasilitas kampus berwawasan global.
13. Terlaksananya perolehan dana dari sumber dana atas usaha mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada yang terdiri dari modal intelektual, modal sarana dan prasarana.

IV.2 Tahapan pencapaian

Tahapan pencapaian tujuan jangka Panjang Polban untuk tahun 2000 – 2025 diilustrasikan pada Gambar 1. Tahapan ini diperbaharui untuk tujuan jangka Panjang tahun 2015 – 2034 seperti diilustrasikan pada Gambar 2



Gambar 2. Tahapan pencapaian jangka panjang 2015 – 2034

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pengembangan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pengembangan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pengembangan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok dalam pengembangan jangka Panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan menjadi prioritas utama pengembangan jangka menengah.

Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut:

a. Pencapaian Jangka Menengah 2015-2019

1. Terinisiasinya sistem penerimaan mahasiswa baru secara digital.
2. Terlaksananya penggunaan elearning dalam kegiatan pembelajaran melalui Learning Manajemen System (LMS) Polban.
3. Terlaksananya Pendidikan karakter yang dilakukan secara sistematis.
4. Terlaksananya program kreatifitas mahasiswa dengan pembiayaan Polban yang mendukung keikutsertaan dalam program sejenis secara nasional.
5. Tercapainya jumlah prodi dengan peringkat akreditasi tertinggi sejumlah >50% jumlah program instusi.
6. Tercapainya penambahan jumlah prodi D4 dan program magister terapan.
7. Terlaksananya sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa tingkat akhir dan dosen.
8. Tercapainya lisensi internasional untuk pusat pelatihan dan sertifikasi.
9. Terwujudnya Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Polban.
10. Terlaksananya peningkatan kualitas dokumen akademik yang unik atau menggunakan kertas bergamaman.
11. Terwujudnya aplikasi administrasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan.
12. Terwujudnya sistem administrasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
13. Tercapainya akreditasi institusi pada peringkat tertinggi.
14. Tercapainya penambahan mitra kerja sama Luar Negeri.
15. Terpenuhinya peringkat reformasi birokrasi.
16. Terinisiasinya pengakuan terhadap keberadaan Polban di tingkat regional.

b. Pencapaian Jangka Menengah 2020-2024

1. Tercapainya jumlah prodi trakreditasi A lebih besar dari 50% jumlah prodi.
2. Tercapainya pemenuhan kompetensi dosen sehingga memperoleh jabatan fungsional tertinggi yang dimungkinkan secara peraturan.
3. Terinisiasinya akreditasi internasional program studi.
4. Tercapainya penambahan jumlah prodi D4 dan program magister terapan
5. Terinisiasinya kerjasama kelas internasional.
6. Terlaksananya aliran internasionalisasi mahasiswa dan dosen.
7. Terinisiasinya kerjasama penelitian secara internasional.
8. Terinisiasinya budaya mengusulkan hak paten, haki, dan pengembangan inovasi.
9. Terinisiasinya pengakuan internasional terhadap prestasi mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik.
10. Terinisiasinya pengakuan internasional atas kompetensi SDM dosen Polban.
11. Tercapainya peningkatan jumlah dosen yang berkualifiaksi akademik S3.
12. Tercapainya penambahan lisensi internasional untuk pusat pelatihan dan sertifikasi.
13. Terinisiasinya Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Polban.
14. Tersertifikasinya para dosen sebagai master trainer nasional dan internasional.
15. Tercapainya akreditasi institusi pada peringkat tertinggi.
16. Tercapainya pengakuan keberadaan Polban secara regional Asean.
17. Terwujudnya tata Kelola kelembagaan Badan Layanan Umum.
18. Terlaksananya proses digitalisasi dokumen akademik.
19. Terpenuhinya peningkatan peringkat reformasi birokrasi.
20. Tercapainya peringkat tertinggi atas penilaian kinerja institusi.
21. Terinisiasinya kampus berkelanjutan dengan standar internasional.

c. Pencapaian Jangka Menengah 2025-2029

1. Terwujudnya akreditasi internasional untuk prodi non-rekayasa dan rekayasa.
2. Terwujudnya sistem credential secara nasional.
3. Terinisiasinya sistem credential secara internasional.
4. Terinisiasinya modul pembelajaran yang diakui secara regional dan internasional.
5. Terwujudnya kelas internasional secara mandiri di Polban maupun melalui kerja sama internasional dengan perguruan tinggi lain.
6. Terwujudnya hak paten yang dikomersialisasikan.
7. Terwujudnya pusat riset yang juga merupakan pusat inovasi.
8. Tercapainya pengakuan internasional terhadap prestasi mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik.
9. Tercapainya pengakuan internasional atas kompetensi SDM dosen Polban.
10. Tercapainya peningkatan jumlah dosen yang berkualifikasi akademik S3.
11. Terinisiasinya modul pelatihan yg diakui secara regional dan internasional.
12. Terwujudnya pusat pelatihan berstandar internasional.
13. Tercapainya peningkatan jumlah lisensi untuk pusat pelatihan dan sertifikasi internasional.
14. Terinisiasinya pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi sebagai salah satu sumber pemasukan dana Polban.
15. Tercapainya peningkatan jumlah dosen yang tersertifikasi master trainer nasional dan internasional.
16. Terlaksananya tata kelola kelembagaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
17. Terwujudnya kampus berkelanjutan dengan mengacu pada standar internasional.
18. Terwujudnya sistem kerja yang mendukung pengembangan karir dosen baik secara administratif maupun operasional.

d. Pencapaian Jangka Menengah 2030-2034

1. Terwujudnya sistem credential yang diakui secara regional dan internasional.
2. Tercapainya peningkatan jumlah prodi terakreditasi internasional.
3. Tercapainya peningkatan jumlah modul pembelajaran yang diakui secara internasional.
4. Tercapainya peningkatan pengakuan internasional terhadap prestasi mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik.
5. Tercapainya peningkatan pengakuan internasional atas kompetensi SDM dosen Polban.
6. Terlaksananya kolaborasi internasional di bidang tridarma.
7. Tercapainya peningkatan hak paten yang dikomersialisasikan.
8. Tercapainya peningkatan jumlah hak paten yang dikomersialisasikan sehingga menjadi salah satu sumber pemasukan dana Polban.
9. Tercapainya peningkatan jumlah dosen yang berkualifikasi akademik S3.
10. Tercapainya peningkatan jumlah modul training yang diakui secara internasional.
11. Tercapainya peningkatan jumlah lisensi untuk pusat pelatihan dan sertifikasi internasional.
12. Terlaksananya kegiatan pelatihan dan sertifikasi bagi industri dan masyarakat luas sebagai salah satu sumber pemasukan dana Polban.
13. Terbentuknya Lembaga sertifikasi Profesi - P2 yang dimungkinkan dengan kelembagaan PTNBH.

14. Tercapainya peningkatan jumlah dosen yang tersertifikasi master trainer nasional dan internasional.
15. Tercapainya pengakuan kampus berkelanjutan secara internasional.
16. Tercapainya penggunaan *energy harvesting* dan energi terbarukan sejumlah 30%.
17. Tercapainya kemampuan pendanaan mandiri >50% kebutuhan dana seluruhnya.
18. Terbentuknya pusat bisnis yang bersifat komersial yang dimungkinkan dengan kelembagaan PTNBH.

BAB V

PENUTUP

Politeknik Negeri Bandung menetapkan visi-misinya untuk menjadi Perguruan Tinggi vokasi terbaik di tingkat nasional maupun ASEAN. Renip Politeknik Negeri Bandung disusun agar program pengembangannya sejalan dengan pencapaian visi-misi tersebut dengan fokus kepada pencapaian sasaran mutu pendidikan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Dengan itu diharapkan insitusi ini bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap pakai di industri nasional maupun internasional. Hal tersebut merupakan kontribusi langsung Politeknik Negeri Bandung dalam peran serta ikut mewujudkan tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur melalui sektor pendidikan dan penyediaan tenaga profesional di tanah air.

Renip ini juga menjaga keselarasan program-program Politeknik Negeri Bandung agar senantiasa relevan dengan mandat dan tugas pokoknya melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan program-program pendidikan dan pengajaran diharapkan menghasilkan keluaran dalam bentuk peningkatan kualitas lulusan pada aspek pengetahuan, intelektual, ketrampilan, sikap, kemandirian dan kewirausahaan. Program-program penelitian mengarah kepada kegiatan riset terapan yang melibatkan tenaga pendidik dan mahasiswa, sehingga menghasilkan tenaga pendidik dan peserta didik yang senantiasa menjaga kekinian ilmunya sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi dan kebutuhan industri. Program pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada implementasi ilmu dan teknologi oleh tenaga pendidik dan mahasiswa sehingga bisa berkontribusi secara langsung di masyarakat dalam bidang pendidikan maupun karya- karya teknologi yang bermanfaat.

Renip akan menentukan arah program kegiatan dalam membangun kapabilitas institusi melalui peningkatan sumber daya yang keberlanjutan serta penguatan tata kelola yang memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan. Pelaksanaan program penguatan tata kelola diharapkan akan meningkatkan kapabilitas institusi dalam menjalankan mandat dan fungsinya sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel serta mampu menjalankan lingkup otonomi yang menjadi mandatnya dengan kinerja yang memuaskan semua pemangku kepentingan.

Renip ini juga mempersiapkan kapabilitas insitusi dan sumber dayanya sehingga mampu mengikuti gerak globalisasi melalui kerjasama internasional. Bentuk kerjasama yang dicanangkan adalah dalam bentuk penelitian bersama, pertukaran mahasiswa serta menjalankan proses belajar mengajar bersama dengan perguruan tinggi asing. Kerjasama internasional ini adalah sebagai bentuk keikutsertaan dunia pendidikan, tenaga didik dan mahasiswa Indonesia di tingkat internasional. Program ini adalah untuk menuju internasionalisasi lembaga yang tidak hanya berkiprah di Indonesia tetapi juga di manca negara, selain itu program ini akan mempermudah lapangan kerja bagi lulusan.

Selain itu, Renip Politeknik Negeri Bandung ini juga mempersiapkan program pengembangan institusi untuk mempunyai kemampuan menjalankan mandat lebih besar sampai ke pelaksanaan pendidikan jenjang pasca sarjana ilmu terapan. Untuk pelaksanaan program kegiatan ke jenjang tersebut Politeknik Negeri Bandung, apabila secara legalitas

diperlukan, akan mempersiapkan diri merubah bentuk lembaganya menjadi menuju kelembagaan dengan tata kelola yang optimal. Akhirnya Renip ini juga memberikan landasan menuju otonomi keuangan yang transparan akuntabel.



POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jln. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234

Telp: 022-2013789 Fax: 022-2013889

Website: www.polban.ac.id email: polban@polban.ac.id
